

**PENGARUH PENERAPAN *GOOD*  
*GOVERNANCE* DAN HASIL PEMERIKSAAN  
BPK RI TERHADAP KINERJA KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA**

(Studi Kasus Pemerintah Provinsi pada Tahun 2008 dan 2012)



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

**MUSTOFA HANIF JATMIKO**

**NIM. 12030114130209**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG**

**2018**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Penyusun : Mustofa Hanif Jatmiko

Nomor Induk Mahasiswa : 12030114130209

Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (Studi Kasus Pemerintah Provinsi pada Tahun 2008 dan 2012)**

Dosen Pembimbing : Drs. Dul Muid, M.Si, Akt.

Semarang, 21 Mei 2018

Dosen Pembimbing

(Drs. Dul Muid, M.Si, Akt.)  
NIP. 196505131994031002

## HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Mustofa Hanif Jatmiko

Nomor Induk Mahasiswa : 12030114130209

Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / Akuntansi

Judul Skripsi : **PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (Studi Kasus Pemerintah Provinsi pada Tahun 2008 dan 2012)**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal ..... 2018

Tim Penguji

1. Drs. Dul Muid, M.Si, Akt. (.....)
2. Siti Mutmainah, S.E., M.Si, Ak (.....)
3. Dr. P. Basuki H. P., MBA, MSAcc, Ak (.....)

## PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Mustofa Hanif Jatmiko, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **“PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (Studi Kasus Pemerintah Provinsi pada Tahun 2008 dan 2012)”**, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 21 Mei 2018

Yang membuat pernyataan,

(Mustofa Hanif Jatmiko)

NIM: 12030114130209

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jangan kerdilkan dirimu dengan takabur. Jangan sempitkan dadamu dengan dengki. Dan jangan keruhkan pikiranmu dengan amarah.” KH. Mustofa Bisri.

“Gantungkan cita-citamu setinggi langit! Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau jatuh di antara bintang-bintang.” Ir. Soekarno.

“Bekerja keras adalah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak, sedangkan bekerja ikhlas ialah bagian dari hati.” Susi Pudjiastuti.

*“I am not in competition with anyone but myself. My goal is to improve myself continuously.”* Bill Gates.

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- Ayah, ibu, kakak dan adek-adekku
- Para guru dan sahabat

## **ABSTRACT**

*The purpose of the study is to analyze empirically the effect of the good governance implementation and investigation result by BPK RI on the financial performance of local government in Indonesia. Good governance implementation measured by government governance index. While investigation result by BPK RI divided to three categories that is audit opinion, evaluation results on intern control system, and audit findings. Variable of local government financial performance measured by effectiveness ratio and efficiency ratio.*

*This study uses secondary data of assessment by Indonesia Government Index Relations Corporation on government governance implementation for each regions, and semi-annually investigation result summaries BPK RI on local government financial statement. This study uses purposive sampling method in determine the sample and using multiple linear regression analysis. Before being conducted the regression test, it is examined by using the classical assumption tests.*

*The results indicates that not at all of independen variable in this study (government governance index, audit opinion, evaluation results on intern control system, and audit findings) effect on financial performance of local government. Government governance index and audit opinion able to increase the local government financial performance, on the contrary audit findings have the negative impact for financial performance of local government. While evaluation results on intern control system do not affect financial performance of local government in Indonesia.*

*Keywords: government governance, investigation results by BPK RI, financial performance of local government*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh penerapan *good governance* dan hasil pemeriksaan BPK RI terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penerapan *good governance* diukur menggunakan indeks tata kelola pemerintahan. Sementara hasil pemeriksaan BPK RI terbagi menjadi tiga kategori yaitu opini audit, hasil evaluasi SPI, dan temuan audit. Variabel kinerja keuangan pemerintah daerah diukur menggunakan rasio efektifitas dan rasio efisiensi.

Penelitian ini dilakukan menggunakan data sekunder yang berasal dari penilaian badan kemitraan Indonesia Government Index terhadap penerapan tata kelola pemerintahan pada masing-masing daerah, dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dalam menentukan sampel dan menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Sebelum dilakukan uji regresi, data terlebih dahulu diuji menggunakan uji asumsi klasik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak semua variabel bebas dalam penelitian ini (tata kelola pemerintahan, opini audit, hasil evaluasi SPI, dan temuan audit) memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Indeks tata kelola pemerintahan dan opini audit berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sebaliknya variabel temuan audit berpengaruh negatif secara signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sementara hasil evaluasi SPI tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci: tata kelola pemerintahan, hasil pemeriksaan BPK RI, dan kinerja keuangan pemerintah daerah.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan pada kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Pengaruh Penerapan *Good Governance* dan Hasil Pemeriksaan BPK RI terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (Studi Kasus Pemerintah Provinsi pada Tahun 2008 dan 2012)”. Sholawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada tauladan yang mulia, Nabi Muhammad SAW.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan, bimbingan, dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Suharnomo, M.Si, selaku dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Bapak Fuad, SET, M.Si, Ph.D., Akt, selaku ketua departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Anis Chariri S.E., M.Com., Ph.D., Akt, selaku dosen wali yang selalu membantu memberikan arahan selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
4. Bapak Drs. Dul Muid, M.Si. Akt, selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak I Made Bayu Dirgantara, SE, MM, dan Ariza Fuadi, SHI, MA, selaku dosen pembina pada organisasi yang pernah saya ikuti, FEPALA, dan Senat

Mahasiswa FEB Undip yang turut membuka wawasan penulis sehingga membuka pemikiran penulis terhadap perencanaan penyusunan skripsi.

6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, terkhusus pada dosen-dosen yang mengampu pada mata kuliah yang saya ambil secara tulus dan ikhlas membagikan ilmu, pengetahuan, dan pengalamannya kepada penulis.
7. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro yang membantu kelancaran administrasi hingga penyelesaian studi penulis.

Ucapkan juga ditujukan kepada orang-orang terdekat dengan penulis selama menjalani studi di jurusan Akuntansi FEB Undip, terutama untuk:

1. Ibu dan Bapak tercinta. Terimakasih atas do'a, kerja keras, nasihat, dan seluruh bentuk cinta dan kasihnya. Terimakasih selalu mengingatkan untuk tidak lupa meninggalkan sholat, belajar bersabar, dan segala hal yang tidak terdapat dalam kurikulum yang diterapkan selama penulis mengambil studi.
2. Kakak dan adik, Azmi Hikmawati, Salsa Fadlila Sobrina, Arbi Yusron Rizaldi, dan Yasmin Ramadhani, selama ini saya belum bisa menjadi saudara yang baik. Semoga kita dapat menjadi yang diharapkan Ibu dan Bapak, aamiin.
3. Tetangga dan sanak saudara dari Ibu maupun Bapak. Terimakasih semuanya, semoga ikatan silaturahmi tidak akan putus kelak.
4. Guru-guru yang telah berbagi ilmunya kepada penulis, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala ilmu yang engkau berikan

dengan sepenuh hati. Maafkan muridmu ini apabila pernah melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak.

5. Ustad maupun Ustadzah di Pondok Pesantren Addainuriyah 2 Semarang. Terkhusus KH. Dzikron Abdullah, terimakasih atas pemahaman tentang agama Islam sehingga menjadi bekal saya kelak di dunia dan akhirat.
6. Ayu Indriani, yang setia menemaniku hingga saat ini, selalu menyemangati untuk selalu menyelesaikan skripsi, mendukungku dalam berbagai kesempatan, dan menghiburku disaat jenuh.
7. Sahabat-sahabatku terutama teman-teman IPS-2, saya sangat beruntung melalui masa SMA dengan kalian.
8. Keluarga besar FEPALA Undip terkhusus angkatan XXIV, Naufal, Khisnun, Chandra, Yana, Aldi, Aldo, Maulana, Yulina, Anisqe, Widya, Sofi, Nanik, Raya, Aurora, dan Ayu jangan berhenti memberi dampak positif kepada lingkungan di sekitar kita.
9. Teman-teman organisasi Senat Mahasiswa dan Badan Audit Kemahasiswaan tahun 2017 atas kesediaannya saling berbagi ilmu dan kerjasamanya selama satu tahun periode kepengurusan.
10. Teman-teman kuliah, khususnya Akundip 14 yang bersedia bekerja-sama dalam menyelesaikan tugas kelompok, dan bersedia menularkan ilmunya kepada saya diluar jam perkuliahan sehingga saya dapat lebih memahami materi-materi yang telah disampaikan oleh dosen di kelas.
11. Teman-teman KKN Desa Cepokomulyo Kecamatan Gemuh Kabupaten Kendal, terimakasih telah bersedia membantu dalam menyelesaikan program

kelompok, dan memberi pengalaman berbeda dalam 42 hari berjalannya program KKN.

12. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan masing-masing. Semoga Allah SWT melimpahkan kasih sayang-Nya untuk kita semua.

Akhirnya dengan keterbatasan yang penulis miliki dalam pengetahuan dan pengalaman, penulis sangat berterimakasih atas saran dan kritik dalam penulisan skripsi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca dan para pihak yang berkepentingan.

Semarang, 21 Mei 2018

Penulis,

Mustofa Hanif Jatmiko  
NIM. 12030114130209

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Rumusan Masalah .....	10
1.3    Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	10
1.3.2 Manfaat Penelitian .....	11

1.4	Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TELAAH PUSTAKA.....		14
2.1	Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	14
2.1.1	Landasan Teori.....	14
2.1.2	Penelitian Terdahulu .....	20
2.2	Kerangka Pemikiran.....	25
2.3	Hipotesis Penelitian.....	26
BAB III METODE PENELITIAN.....		30
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel .....	30
3.1.1	Variabel Dependen dan Variabel Independen.....	30
3.1.2	Definisi Operasional.....	31
3.2	Populasi dan Sample .....	34
3.3	Jenis dan Sumber Data .....	35
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	36
3.5	Metode Analisis .....	36
3.5.1	Statistik Deskriptif .....	36
3.5.2	Uji Asumsi Klasik .....	36
3.5.3	Pengujian Hipotesis.....	38
BAB IV HASIL DAN ANALISIS .....		41
4.1	Deskripsi Objek Penelitian.....	41

4.2	Analisis Data .....	42
4.2.1	Statistik Deskriptif .....	42
4.2.2	Uji Asumsi Klasik .....	47
4.2.3	Uji Hipotesis.....	54
4.3	Interpretasi Hasil .....	62
BAB V PENUTUP .....		68
5.1	Simpulan .....	68
5.2	Keterbatasan.....	69
5.3	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....		70
LAMPIRAN .....		74

## DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu .....	22
Tabel 3. 1 Kriteria Penilaian Tingkat Efektifitas.....	32
Tabel 3. 2 Kriteria Penelitian Tingkat Efisiensi .....	32
Tabel 4. 1 Perincian Tabel Penelitian .....	41
Tabel 4. 2 Statistik Deskriptif.....	43
Tabel 4. 3 Statistik Kolonieritas Model Regresi 1 .....	48
Tabel 4. 4 Tabel Durbin-Watson Model Regresi 1.....	49
Tabel 4. 5 Tabel Uji KS Model Regresi 1 .....	50
Tabel 4. 6 Tabel Statistik Kolonieritas Model Regresi 2 .....	51
Tabel 4. 7 Tabel Durbin-Watson Model Regresi 2.....	52
Tabel 4. 8 Tabel Uji KS Model Regresi 2 .....	53
Tabel 4. 9 Tabel ANOVA Model Regresi 1 .....	56
Tabel 4. 10 Tabel ANOVA Model Regresi 2.....	56
Tabel 4. 11 Tabel Koefisien Model Regresi 1 .....	57
Tabel 4. 12 Tabel Koefisien Model Regresi 2.....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran .....	25
Gambar 4. 1 Grafik <i>Scatterplot</i> Model Regresi 1 .....	49
Gambar 4. 2 Grafik <i>Scatterplot</i> Model Regresi 2.....	53

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Daftar sampel pemerintah daerah .....	74
Lampiran B. Indikator pengukuran tata kelola pemerintahan.....	76
Lampiran C. Hasil output model persamaan regresi 1 .....	93
Lampiran D. Hasil output model persamaan regresi 2 .....	99

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah tingkat I sesuai asas otonomi daerah dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam aturan lain yaitu Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pemerintah daerah memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk memajukan daerahnya sesuai kebutuhan masing-masing daerah yang dinaunginya. Hal tersebut juga disertai dengan bertambahnya wewenang pemerintah daerah untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan dari yang sebelumnya dimiliki oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sebagai bentuk tanggung jawab atas bertambahnya kewenangan tersebut maka pemerintah daerah harus dapat meningkatkan kinerja serta akuntabilitasnya.

Tujuan utama dibentuknya kedua Undang-Undang tersebut bukanlah sebagai pengalihan hak dan kewajiban pemerintah pusat ke pemerintah daerah, melainkan bertujuan dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang baik dan bijak sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu pemerintah daerah perlu menyusun laporan keuangan yang akuntabel, transparan, dan kredibel agar dapat menggambarkan secara nyata pengelolaan keuangan daerah tersebut. Hal ini sesuai

dengan poin utama diselenggarakannya suatu daerah otonom yang mandiri terutama pada pengelolaan sumber daya salah satunya yaitu sektor keuangan.

Disusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dapat mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah yang digambarkan melalui akun-akun dalam laporan keuangan. Hal tersebut dapat menjadi tolak ukur bagi pemerintah pusat, dan masyarakat melalui DPR ataupun secara langsung sebagai pengawasan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan. Pos-pos dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu pendapatan, pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja kemudian dikonversi menjadi rasio keuangan yang telah digunakan dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Rasio efektifitas dan rasio efisiensi adalah dua dari keseluruhan rasio-rasio keuangan daerah yang paling tepat, singkat, dan akurat untuk menggambarkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Efektifitas menjelaskan kinerja pemerintah daerah dilihat dari sisi pendapatan, dimana pemerintah dituntut mampu menarik pendapatan dari berbagai potensi pendapatan daerah yang diuraikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah daerah dengan kinerja yang efektif akan mampu menarik pendapatan mendekati atau melebihi anggaran pendapatannya. Sementara efisiensi menjelaskan kinerja pemerintah daerah dilihat dari segi belanja atau pengeluaran pemerintah daerah digambarkan oleh pos realisasi belanja, pemerintah daerah dituntut mampu untuk menghemat dalam arti selektif dalam membelanjakan kas daerah sehingga transaksi-transaksi yang tidak

perlu tidak turut membebani keuangan daerah tanpa mengurangi kualitas maupun kuantitas program-program yang telah direncanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah dengan kinerja yang efisien mampu membelanjakan keuangan daerah seminimal mungkin dibandingkan dengan pendapatannya.

Kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Pengaruh internal banyak dipengaruhi oleh kualitas dan kuantitas sumber daya, terutama sumber daya manusia dalam mengelola pemerintahan, keuangan, dan aset daerah dengan optimal. Sementara faktor eksternal dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kompleks seperti ekonomi makro maupun mikro, kondisi politik, badan pengawas, serta masyarakat umum. Pengaruh internal menjadi atensi tersendiri mengingat faktor internal merupakan pengaruh yang dapat kontrol langsung oleh pemerintah daerah itu sendiri lain halnya dengan pengaruh eksternal dimana pemerintah daerah tidak cukup memiliki kapasitas untuk mengontrol pengaruhnya.

Pemerintah daerah sebagai suatu entitas yang menjalankan roda pemerintahan di tingkat daerah tidak bisa lepas dari kondisi globalisasi. Kesadaran akan pentingnya *good governance* (GG) semakin meningkat setelah krisis pada pertengahan 1997 di negara-negara Asia, termasuk Indonesia yang kemudian dikenal dengan adanya era reformasi. Iskander dan Chamlou (dalam Wahyudin & Solikhah, 2017) menyatakan bahwa krisis ekonomi bukan hanya karena faktor makroekonomi tetapi juga karena lemahnya tata kelola di negara-negara ini, seperti kurangnya standar hukum dan akuntansi, audit keuangan belum ditetapkan, tidak adanya komisariss pengawasan dan mengabaikan hak pemangku kepentingan

minoritas. Ini berarti bahwa penerapan tata kelola yang baik akan memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Dirangkum dari Suryana (2016) bahwasanya banyak diantara kepala daerah yang terlibat *fraud* merupakan daerah dengan indeks tata kelola pemerintahan yang dikeluarkan oleh Indonesia Governance Indeks (IGI) dibawah rata-rata nasional. Salah satu contoh diantaranya yaitu gubernur Bengkulu, Agusrin Najamudin melakukan korupsi dana bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Tanah dan Bangunan yang merugikan negara hingga Rp 21,3 miliar dan divonis hukuman empat tahun penjara pada tahun 2012 dimana pada tahun tersebut Provinsi Bengkulu memperoleh indeks tata kelola pemerintahan sebesar 4,81 cukup jauh dibawah rata-rata nasional yaitu 5,67. Contoh lainnya ialah Suwana Abdur Fatah yang diamanatkan sebagai Gubernur Kalimantan Timur menyalahgunakan wewenang dalam pembebasan lahan sawit di daerah yang dinaunginya, ditetapkan sebagai tersangka sejak 19 Juni 2006 dan divonis 1,5 tahun penjara dan denda Rp 200 juta, dimana dua tahun berikutnya Kalimantan Timur mendapatkan indeks tata kelola pemerintahan sebesar 4,79 dibawah rata-rata nasional yaitu 5,11. Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo (dalam Wicaksono, 2018) juga mendukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dalam upaya pemberantasan korupsi, “daerah yang bebas korupsi dianggap telah mampu memahami tata kelola dalam pemerintahan dengan baik.” katanya.

Penelitian Wahyudin & Solikhah (2017) yang mengaitkan antara tata kelola dengan organisasi sektor swasta menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara penerapan tata kelola yang baik terhadap peningkatan kinerja keuangan pada

organisasi sektor swasta. Ada tiga poin penting yang mendukung terciptanya *good governance* dalam sektor publik menurut Effendi (dalam Handayani, 2012), yaitu pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. *Good governance* akan terlaksana dengan baik apabila adanya sinergitas dalam penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi diantara ketiga poin penting di atas. Akan tetapi terdapat prasyarat agar sinergitas tersebut mampu terwujud, yaitu adanya kepercayaan masyarakat, partisipasi aktif, dan regulasi yang adil. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yaitu dengan adanya akuntabilitas publik.

Akuntabilitas oleh pemerintah daerah adalah hal yang sangat penting mengingat kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola kekayaan daerah, sehingga diperlukan adanya pertanggungjawaban atas pengelolaan tersebut. Pada konteks teori agensi, masyarakat selaku pihak memberikan amanat melalui sistem demokratis kepada kepala pemerintah daerah terpilih berhak mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya atas kinerja pemerintahan, hal ini didukung dengan pernyataan Mardiasmo (2006) dimana masyarakat menuntut lebih besar adanya transparansi dan akuntabilitas publik terhadap pemerintah daerah termasuk didalamnya pemerintah daerah. Dengan adanya pertanggungjawaban tersebut, masyarakat dituntut berperan aktif dalam mengawasi kinerja pemerintah daerah, sehingga pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sejalan dengan hal tersebut, Scott (1997) menjelaskan bahwa keutuhan suatu entitas dapat dilihat dari kemampuan entitas tersebut dalam menyampaikan informasi yang terbuka, merata, dan seimbang bagi seluruh pemangku kepentingan. Dapat

disimpulkan bahwa keterbukaan informasi oleh pemerintah daerah merupakan hal penting bagi keberlangsungan pemerintah daerah.

Salah satu bentuk akuntabilitas publik mendasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintahan yaitu akuntabilitas keuangan (Mardiasmo, 2002). Akuntabilitas keuangan adalah bentuk tanggungjawab mengenai pengelolaan, pelaporan, dan kepatuhan setiap kejadian ekonomi terhadap peraturan-peraturan yang berketetapan hukum. Sasarannya yaitu laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam PP No. 71 tahun 2010 yang memuat Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah digambarkan pada tingkat akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dapat menjadi tolak ukur bagi masyarakat dalam memonitor pelaksanaan otonomi daerah.

Hubungan antara pemerintah dan masyarakat di Indonesia belum dapat dijelaskan dengan baik oleh teori *stewardship*. Pengabdian atau *stewardship* berasumsi bahwa di sana tidak terdapat konflik antar individu dalam suatu organisasi karena masing-masing menginginkan tercapainya *goal congruence* dalam organisasi (Tantri, 2012). Hal tersebut belum dapat ditemui di Indonesia dimana masih banyak ditemukan korupsi, penyelewengan kekuasaan, permainan dalam penyusunan anggaran, dan lain sebagainya. Regulasi adalah suatu hal yang menjadi penghubung antar kepentingan satu dengan kepentingan lainnya. Hal ini juga diungkap oleh Tjandra (2017) yang menyatakan bahwa kecenderungan kepala

daerah untuk melunasi “utang politik” yang digunakan kontestasi politik lokal yang begitu tinggi, sehingga mengakibatkan kepala daerah menjadi acuh dalam mencari sumber-sumber pembiayaan untuk menutup ”utang politik” tersebut. Oleh dari pernyataan tersebut organisasi sektor publik khususnya di pemerintahan pusat dan daerah secara sadar atau tidak sadar, telah mempraktikkan teori keagenan.

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai *agent* bagi masyarakat (*principal*) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi masyarakat (Setiawan & Muid, 2012). Hal ini tidak lepas kaitannya dengan masalah asimetri informasi. Pihak *agent* memiliki informasi keuangan yang lebih banyak daripada pihak *principal* dapat menyusun laporan keuangan yang *misleading* bagi *principal*. Di sisi lain, pihak *principal* pun dapat menggunakan wewenangnya untuk memenuhi kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Adanya asimetri informasi tersebut yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh pemerintah. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme *checks and balances* agar dapat mengurangi asimetri informasi.

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas keuangan yang direpresentasikan oleh laporan keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan pemeriksaan sebagaimana disebutkan dalam UUD RI tahun 1945 pasal 23 poin E ayat 1 yang berbunyi, “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”.

Sebagai bagian dari fungsinya untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan pemanfaatan keuangan negara, yaitu dengan memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah yang dijelaskan dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 81 ayat 1 yang berbunyi, “Pemerintah Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”.

Pemeriksaan oleh BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki output yang disusun dan diringkas dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) diterbitkan *semi-annually* atau dua kali setahun. Dalam rangka memberikan kewajaran informasi, hasil pemeriksaan atas laporan keuangan disajikan dalam tiga kategori yaitu (1) memberikan opini audit, (2) evaluasi atas sistem pengendalian intern, dan (3) pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pertanggungjawaban pemerintah dalam bentuk hasil pemeriksaan BPK, secara teoritis dan empiris meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah sehingga terciptanya pemerintahan yang demokratis, bersih, efektif, dan efisien sesuai dengan tujuan otonomi daerah.

Pada realitasnya hasil pemeriksaan BPK RI khususnya opini audit yang baik belum mampu menunjukkan kinerja pemerintah daerah yang baik pula. Praktik “jual-beli” predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) masih ditemui oleh beberapa oknum dari BPK RI. Dirangkum dari Taher (2018) yang mengungkapkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap Bupati Purbalingga, Tasdi, pada tahun ini. Politikus PDIP tersebut ditetapkan sebagai tersangka perkara

korupsi pembangunan Islamic Center, menariknya Ia tercatat berhasil membawa Purbalingga memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama dua tahun secara berturut-turut, yaitu 2017-2018. Hal serupa diungkapkan oleh ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (dalam Retaduari, 2017) yang menyatakan bahwa pemberian opini WTP tidak menjamin bahwa pada entitas yang bersangkutan tidak terdapat korupsi, sebab pemeriksaan laporan keuangan tidak ditujukan secara khusus untuk mendeteksi korupsi. “Namun demikian, BPK wajib mengungkapkan apabila menemukan ketidakpatuhan atau ketidakpatutan baik yang berpengaruh atau tidak berpengaruh terhadap opini atas laporan keuangan,” tegasnya.

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk membuktikan teori yang menyakini bahwa baik tata kelola pemerintahan yang baik dan hasil pemeriksaan BPK RI yang positif berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah serta menambah referensi dengan memperoleh bukti empiris terkait PENGARUH PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DAN HASIL PEMERIKSAAN BPK-RI TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA (Studi Kasus Pemerintah Provinsi pada Tahun 2008 dan 2012). Kemitraan Indonesia Governance Index (IGI) mengeluarkan laporan penilaian terhadap penerapan tata kelola pemerintahan di Indonesia empat tahun sekali semenjak tahun 2008, sementara data tahun 2016 belum dipublikasikan hingga saat penulis memulai penelitian.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis di atas maka disusun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan *good governance* dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah hasil evaluasi SPI pemerintah daerah memiliki dampak negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah kepatuhan atas peraturan perundang-undangan oleh pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh penerapan *good governance* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
2. Mengetahui pengaruh opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
3. Mengetahui pengaruh hasil evaluasi atas SPI pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
4. Mengetahui pengaruh kepatuhan atas peraturan perundang-undangan oleh pemerintah daerah terhadap kinerja keuangannya.

### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Pemerintah Daerah**

Penelitian ini menginformasikan lebih mendalam tentang pengaruh penerapan tata kelola pemerintahan, dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sesudah penilaian sehingga dapat menjadi rujukan maupun evaluasi bagi pemerintah daerah.

#### **2. Bagi Akademisi**

Penelitian ini menginformasikan lebih mendalam tentang bagaimana pengaruh penilaian penerapan tata kelola pemerintahan, dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sesudah penilaian sehingga dapat menambah wawasan di kalangan akademisi.

#### **3. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini memberikan informasi lebih mendalam tentang bagaimana pengaruh penilaian penerapan tata kelola pemerintahan, dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sesudah penilaian sehingga menjadi bahan masyarakat dalam mengiringi kebijakan-kebijakan pemerintahan provinsi dalam menjalankan tugasnya.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Penulis menggunakan sistematika penulisan dalam penelitian ini yang dijabarkan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang yang mendasari penulis melakukan penelitian, rumusan masalah berdasarkan uraian latar belakang, tujuan dan kegunaan penelitian bagi pihak-pihak terkait, serta sistematika penulisan.

## **BAB II TELAAH PUSTAKA**

Bab ini berisikan tentang landasan teori merupakan rangkuman teori-teori yang dipakai dalam melakukan penelitian, penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisikan tentang pemaparan variabel penelitian dan definisi operasionalnya, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

## **BAB IV HASIL DAN ANALISIS**

Bab ini berisi pemaparan hasil analisis yang terbagi dalam deskripsi objek sampel penelitian, analisis data, dan interpretasi hasil.

## **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan secara keseluruhan, keterbatasan penulis dalam menyelesaikan penelitian, dan saran berdasarkan hasil penelitian.